

Menuju Kawasan Desa-Kota yang Berkelanjutan Studi Kasus Kawasan Desa-Kota di Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta

Gutomo Bayu Aji
Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan – LIPI

Pendahuluan

Isi makalah ini sedikit banyak disarikan dari hasil penelitian sebelumnya dimana saya tergabung dalam tim penelitian itu.¹ Pada akhir tahun 1988, kami bertemu dan mencoba melihat fenomena di daerah pinggiran kota (*urban fringe*) di Yogyakarta. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya ditentukan sebuah kawasan desa-kota yang secara administratif masuk ke dalam wilayah desa Maguwoharjo. Tiga tahun penelitian ini berlangsung, secara bertahap, dengan kontrak penelitian Hibah Bersaing dari pemerintah. Laporan penelitian ini sudah diselesaikan pada pertengahan tahun ini dengan konsentrasi pada perumusan model mengenai pola ruang konsentris di daerah pinggiran kota Yogyakarta. Tulisan ini tidak akan mengulas laporan itu kendatipun memanfaatkan data hasil penelitiannya. Orientasi pada suatu bentuk pengelolaan kawasan desa-kota merupakan daya tarik tersendiri saat ini.

Diskusi mengenai pengelolaan suatu kawasan khususnya menyangkut pencarian format suatu bentuk pengelolaan kawasan yang ideal terutama dalam konteks tata hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, belakangan menjadi persoalan yang menarik, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan reformasi dan redemokratisasi menuju otonomi daerah. Diskusi ini sering dilakukan oleh kalangan NGO's yang concern terhadap pengelolaan SDA seperti hutan, pesisir dan laut, perairan dan lahan basah, budidaya pertanian (Kay, 1999; Juhendi, 2000). Belakangan, diskusi ini juga merebak di kalangan NGO's perkotaan menyangkut soal tata ruang dan lingkungan perkotaan. Tulisan ini mengisi salah satu bagian dari persoalan itu yakni tidak adanya suatu bentuk pengelolaan kawasan desa-kota yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan daerah pinggiran kota atas meluasnya wilayah perkotaan.

Maguwoharjo 1977-1999: Dari Spasial Desa ke Desa-Kota

Analisis spasial yang dilakukan oleh tim peneliti Geografi memperlihatkan adanya perubahan fungsi-fungsi spasial yang sangat menyolok. Analisis ini didasarkan pada rekonstruksi peta berdasarkan peta topografi tahun 1977 ke tahun 1999. Analisis ini menghasilkan suatu ilustrasi visual-spasial yakni bagaimana fungsi-fungsi spasial di desa Maguwoharjo itu telah berubah secara drastis pada

¹ Subroto, T. Yoyok Wahyu, M.R. Djarot Sudharto Widyatmoko, Gutomo Bayu Aji, (2001). *Model Pola Ruang Konsentris untuk Restrukturisasi Daerah Pinggiran Kota (Urban Fringe) di Indonesia Studi Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta*, Lembaga Penelitian - Universitas Gadjah Mada, Oktober.

tahun 1999. Untuk menjelaskan ilustrasi visual-spasial ini diperlukan dukungan data statistik penggunaan lahan desa yang juga bersumber dari analisis peta topografi tahun 1977 tersebut. Berdasarkan analisis ini, perubahan fungsi spasial di desa Maguwoharjo bisa dijelaskan dengan cara mengikuti dua periodisasi waktu yakni antara kurun waktu tahun 1977-1993 dan 1993-1999.

Maguwoharjo: Periode Tahun 1977-1993

Pada tahun 1977, fungsi lahan terbesar di desa Maguwoharjo digunakan untuk sawah (42,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa corak masyarakat desa Maguwoharjo adalah masyarakat pertanian yakni pertanian sawah. Ilustrasi ini juga terlihat pada peta topografi tahun 1977 dimana permukiman penduduk (31,9%) terkesan dikelilingi oleh areal persawahan yang relatif masih cukup luas. Sementara itu, areal permukiman penduduk tampak berkembang secara alami dengan mengikuti koridor sepanjang jalan (utama). Di belakang permukiman umumnya sudah dimanfaatkan penduduk untuk areal persawahan.

Menarik sekali mengikuti perkembangan pola permukiman penduduk yang berkembang secara alami yang membentuk suatu areal permukiman penduduk pedesaan dan yang mempunyai interaksi langsung dengan lingkungannya yakni sawah. Pola ini juga didukung misalnya dengan tersedianya lahan untuk tubuh air (6%) dan ladang/tegalan (19,2%) yang menunjukkan adanya sistem pertanian lahan kering, walaupun persentasenya kecil. Artinya, tidak seluruh lahan pertanian di desa itu sejak dahulu terkena aliran irigasi teknis yang disediakan oleh selokan (*chanal*) Mataram, yang sudah dibangun sejak jaman pemerintahan Jepang (1942-1945).

Pada tahun 1993, areal permukiman penduduk telah meningkat (29,3%) atau kini persentase luasnya menjadi 41,2%, lebih luas dari areal persawahan (35,2%). Sedangkan luas areal persawahan terhitung telah menurun sekitar – 18,0%. Data yang sangat mengejutkan ditunjukkan oleh penurunan luas areal ladang/tegalan yang luar biasa yakni mencapai –56,6%, sedangkan tubuh air menurun –7,4%. Di samping itu, pada tahun 1993 ini variasi fungsi lahan menunjukkan adanya kebun campuran (3,4%), perumahan (0,7%), lahan tidur (3,7%), lahan komersial (0,9%), dan fasilitas umum lainnya (1,1%). Variasi fungsi lahan pada tahun ini lebih banyak jika dibandingkan pada analisis tahun sebelumnya (1977) dan terkesan mulai mengaburkan fungsi-fungsi dominan saat itu seperti pertanian dan permukiman.

Perubahan yang cukup besar pada tata fungsi lahan di desa Maguwoharjo ini setidaknya dipicu oleh tiga hal yakni, (1) dibangunnya jalan lingkar (*ring-road*) kota Yogyakarta yang melintasi desa Maguwoharjo sejak tahun 1985, (2) dibangunnya sejumlah kampus swasta seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER), Universitas Sanata Dharma (SADAR), dan Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi (STIE-YKPN) yang berada di sekitar desa itu, dan (3) dibangunnya kompleks perumahan di desa dan terutama sebagian besar berada di sekitar desa ini.

Sejumlah fasilitas umum yang dibangun di desa dan di sekitar desa Maguwoharjo itu telah menjadi daya tarik pendatang untuk menempati lahan desa itu. Kampus misalnya, telah menyedot sejumlah besar mahasiswa yang tinggal di desa dan di sekitar desa itu dengan cara menyewa pondokan. Di sepanjang koridor *ring-road* sejumlah besar pendatang karena tertarik dengan mudahnya akses transportasi mulai membangun permukiman-permukiman baru yang cenderung membentuk suatu pola yang memusat (aglomerasi) dan menghimpun (konurbasi) (Subroto, 2000). Demikian pula dengan keberadaan kompleks perumahan baru.

Maguwoharjo: Periode Tahun 1993-1999

Jika pada periode sebelumnya yakni periode tahun 1977-1993 perubahan spasial di desa Maguwoharjo ditandai dengan dibangunnya fasilitas umum seperti jalan dan kampus, maka pada periode berikutnya yakni pada periode tahun 1993-1999 perubahan spasial di desa Maguwoharjo ditandai dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas komersial yang sangat banyak. Kecenderungan pola pada kedua periode waktu itu juga berbeda, disamping karena sifatnya, juga karena faktor pembentukannya. Jika pada periode pertama pembangunan fasilitas-fasilitas umum dilakukan oleh pemerintah dan swasta, maka pada periode kedua ini didominasi oleh kegiatan individu dan rumah-tangga.

Perubahan penggunaan lahan yang sangat menyolok pada periode ini adalah meningkatnya persentase perubahan lahan komersial yakni mencapai sekitar 469,8%. Gejala ini tetap diikuti dengan merosotnya lahan pertanian sawah (-11,6%), kebun campur (-27,9%), dan lahan kosong (-21,9%). Gejala lain yang menarik adalah meningkatnya penggunaan lahan perumahan (95,1%) dari tahun 1993-1999 itu. Meningkatnya jumlah lahan yang diperuntukkan guna lahan perumahan juga mengindikasikan adanya proses komersialisasi lahan-lahan pedesaan yang semakin tinggi.

Gejala pembentukan kawasan desa-kota, sebenarnya sudah dimulai dengan sangat nyata pada periode pertama yakni tahun 1977-1993 dengan ditandai dengan berbagai pembangunan fasilitas publik. Sementara itu pada periode tahun berikutnya yakni 1993-1999, proses pembentukan kawasan desa-kota itu ditandai dengan komersialisasi lahan-lahan desa. Gejala komersialisasi ini juga diikuti dengan proses privatisasi lahan-lahan desa menjadi lahan-lahan yang semakin ketat kepemilikannya serta semakin efektif peruntukannya.

Sementara itu gejala komersialisasi lahan yang paling populer di desa ini adalah merebaknya fungsi-fungsi komersial individu serta rumah-tangga terhadap lahan-lahan milik pribadi mereka. Penggunaan lahan untuk sarana perdagangan umum dalam skala kecil tetapi dalam jumlah yang menjamur merupakan ciri pemanfaatan lahan desa itu untuk kegiatan jasa (perekonomian) dalam skala kecil

(individu dan rumah-tangga). Gejala ini merupakan respon meningkatnya kebutuhan penduduk asli dan pendatang akan fasilitas jasa sehari-hari.

Pada kedua periode waktu itu sangat jelas terlihat bagaimana desa Maguwoharjo itu telah berkembang menjadi suatu kawasan desa-kota dengan fasilitas umum dan komersial kekotaan. Keberadaan Maguwoharjo yang dekat dengan bandar udara Adisutjipto mendorong investor untuk membangun hotel-hotel di desa dan sekitar desa ini seperti misalnya, Sheraton Mustika Ratu. Sebagai suatu kompleks kawasan desa-kota, Maguwoharjo secara keseluruhan bersama dengan wilayah kecamatan Depok, kabupaten Sleman, diorientasikan untuk pengembangan kawasan wisata dan pendidikan (Riyadi, 2001).

Kegiatan Jasa: Fenomena Struktur Sosial Kekotaan

Data pada bagian ini didasarkan pada hasil survey terhadap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga penduduk desa Maguwoharjo pada tahun 2000. Survey ini mengambil sampel kecil yakni 160 responden di empat dusun di desa itu yang dipilih secara *stratified*. Dasar pemilihan dusun itu adalah dusun-dusun yang lebih terbangun (*More Development Urban Fringe*) dan dusun-dusun yang kurang terbangun (*Less Development Urban Fringe*) yang ada di bagian dalam (*inner-fringe*) dan di bagian luar (*outer-fringe*) *ring-road* (Subroto, 2000).²

Beberapa hasil survey yang penting ditampilkan pada bagian ini adalah jenis pekerjaan penduduk dan penghasilan. Sementara itu untuk menganalisis hubungan-hubungan di dalam struktur sosial itu akan digunakan analisis data kualitatif mengenai jenis kegiatan di sektor ini dan kaitannya dengan kehidupan mereka termasuk diantaranya kecukupan penghasilan mereka. Data ini dikumpulkan melalui indepth dengan beberapa informan kunci.

Berdasarkan hasil survey terlihat bahwa sebagian besar pekerjaan penduduk berada di sektor jasa (76,2%) yang dikelompokkan menjadi kegiatan jasa pelayanan masyarakat (20,6%) dan kegiatan jasa dengan komponen perekonomian yang mencapai persentase tertinggi (55,6%). Sementara itu jenis pekerjaan di sektor pertanian sudah sangat rendah (11,9%) terutama bergantung pada hasil sawah (10,6%) dan pemeliharaan hewan (1,3%).

Sedangkan variasi jenis pekerjaan yang lain tersebar diantara sektor perdagangan (5,6%), industri (1,3%), dan purnabhakti (5,0%). Dengan melihat variasi jenis pekerjaan ini dapat dikatakan bahwa Maguwoharjo bukan lagi desa yang murni dalam arti yang mengandalkan pada sektor pertanian semata. Ada jenis-jenis pekerjaan lain yang tumbuh bahkan cukup dominan menggeser jenis pekerjaan di sektor pertanian yakni jenis pekerjaan di sektor jasa.

² Batasan *inner-fringe* dan *outer-fringe* disini menggunakan batasan fisik yakni *ring-road* yang melingkari kota Yogyakarta. Batasan dengan menggunakan jarak dikemukakan oleh Russwurm (1987), lihat juga Koestoer, (1997).

Jenis-jenis pekerjaan di sektor jasa ini sangat variatif misalnya sopir, makelar, agen/distributor, bengkel, buruh cuci, pemulung sampah, warung makan, toko kelontong, tambal ban, wartel, dan sebagainya. Umumnya jenis-jenis pekerjaan di sektor jasa yang berkembang di daerah ini merupakan jenis pekerjaan jasa skala kecil. Jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perseorangan untuk mencukupi kebutuhan subsistensi rumah-tangga.

Apabila memperhatikan tingkat penghasilan penduduk terlihat bahwa sebagian besar diantara mereka berpenghasilan di bawah Rp500.000,- per bulan dan sebagian besar diantaranya di bawah Rp250.000,- per bulan. Penduduk yang berpenghasilan diatas satu juta rupiah per bulan sangat sedikit dan mereka yang memiliki penghasilan ini adalah pendatang yang mempunyai pekerjaan sangat mapan. Mereka ini yang kemudian dianggap penduduk setempat sebagai orang kaya.

Apabila memperhatikan tempat kerja penduduk terlihat bahwa sebagian besar diantara mereka mempunyai tempat kerja di dalam desa sendiri, sebagian kecil lainnya berada di luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten dan propinsi. Berdasarkan hasil indepth, penduduk yang bekerja di luar propinsi ini mempunyai pekerjaan tetap di Yogyakarta tetapi sebagian waktunya digunakan untuk bekerja di Jakarta. Diantara mereka ini hanya segelintir orang yang disebut sebagai orang kaya.

Memudarnya Kegiatan Pertanian dan Struktur Agraris

Hasil tabulasi silang antara penguasaan luas sawah dengan jenis pekerjaan penduduk memperlihatkan bahwa sebagian besar (68,6%) sawah dikuasai oleh orang-orang yang jenis pekerjaannya bukan petani. Mereka umumnya menguasai sawah tetapi tidak menggarapnya atau sebatas sebagai pemilik, bukan penggarap. Sementara itu yang menjadi penggarap adalah petani penyewa, biasanya dengan sistem bagi hasil, atau dari hubungan sewa-menyewa ini kemudian muncul jenis pekerjaan buruh tani.

Dari hasil survey juga terlihat bahwa mereka yang menguasai sebagian besar sawah itu adalah orang-orang yang terutama mempunyai jenis pekerjaan di sektor jasa baik jasa pelayanan masyarakat maupun jasa dengan komponen perekonomian. Di samping itu, jenis pekerjaan pensiun dan perdagangan juga mengambil peran dalam penguasaan sawah ini. Sementara petani hanya menguasai sebagai kecil (31,4%) dari luas sawah yang ada.

Dari hasil tabulasi silang yang lain juga terlihat bahwa penguasaan sawah itu jauh lebih besar dikuasai oleh penduduk asli (97,8%) daripada penduduk pendatang. Artinya, hanya sebagian kecil penduduk pendatang yang menguasai sawah dan bermatapencarian sebagai petani. Umumnya penduduk pendatang sudah memiliki pekerjaan tetap sebelum tinggal di daerah ini, dan mereka tinggal di daerah ini karena mencari lokasi permukiman, bukan pekerjaan.

Dari fenomena ini terlihat bagaimana hubungan-hubungan dalam struktur agraris itu telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup berarti terutama dengan dikuasainya sawah oleh sekelompok orang yang bukan petani. Artinya, mata pencaharian pertanian kini telah menjadi jenis matapencaharian bukan utama atau nomor dua, sambilan, tambahan. Pandangan ini terutama datang dari orang-orang yang memiliki jenis pekerjaan di sektor jasa dan menguasai sawah.

Pandangan ini setidaknya semakin memarginalkan petani kecil dan buruh tani yang menganggap jenis pekerjaan itu sebagai matapencaharian utamanya. Sifat ketergantungan petani kecil dan buruh tani pada sekelompok orang yang bermatapencaharian utama di sektor jasa ini juga tidak mendukung hubungan-hubungan agraris karena sektor jasa yang telah menjadi tumpuan utama yang akan berkembang sementara sektor pertanian hanya tambal-sulam.

Penduduk Lokal vs (Elit) Pendetang

Berbagai pandangan yang diperoleh selama indepth menunjukkan hubungan antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Keduanya mempunyai sifat-sifat yang kontroversial seperti misalnya, penduduk lokal dianggap bodoh dan tak berpendidikan sementara penduduk pendatang dipandang berpendidikan dan wakil dari kemajuan. Penduduk lokal dipandang miskin sementara penduduk pendatang dianggap kaya dan membawa perubahan lingkungan, dsb.

Secara sosial-ekonomi, penduduk pendatang mewakili kelompok kaya atau yang dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan disebut elit ekonomi sementara penduduk lokal menerima realitas itu sambil menyaksikan runtuhnya elit-elit sosial lama yang didasarkan atas penguasaan tanah dan hubungan-hubungan kerja majikan-buruh terhadapnya. Seiring dengan mudarnya aktivitas pertanian, elit sosial lama telah tergantikan oleh elit sosial baru yang tidak tergantung dari sistem matapencaharian pertanian, dan cenderung terpelajar.

Perbedaan basis mata pencaharian, latar belakang pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, gaya hidup dan pandangan-pandangan kemasyarakatan lainnya telah menimbulkan gap/jurang pemisah antara penduduk lokal dengan pendatang di dalam dusun. Kondisi ini diperparah dengan tidak membaurnya penduduk pendatang yang tinggal di permukiman penduduk lokal seperti misalnya dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah berlangsung lama.

Pengaruh yang cukup kuat penduduk pendatang dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ini terjadi antara lain pada komersialisasi bentuk-bentuk kegiatan gotong-royong di dalam dusun yang dibayar dengan uang. Selain itu, penduduk pendatang juga memberikan sumbangan-sumbangan untuk kegiatan pembangunan fisik di dalam dusun seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya. Dengan cara ini kesenjangan antara penduduk lokal dengan pendatang itu

tetap terjaga keharmonisannya dan jarang menimbulkan konflik-konflik sosial secara terbuka.

Persepsi Penduduk terhadap Lingkungan

Survey terhadap persepsi penduduk berkenaan dengan kondisi tanah, air, dan udara memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kondisi lingkungan fisiknya masih cukup baik, walaupun menurunnya kualitas lingkungan fisik sudah mulai dirasakan oleh mereka. Kekhawatiran penduduk terhadap kondisi lingkungan fisik ini juga dirasakan tinggi diantaranya terjadinya penggusuran, limbah rumah tangga, tidak adanya tempat pembuangan sampah, banyaknya lalat, udara semakin kotor, sumur semakin dalam, irigasi macet, dsb.

Dari berbagai jenis kekhawatiran itu, hal yang menurut responden paling menonjol adalah kekhawatiran penduduk terhadap sungai yang semakin kotor dan tidak adanya tempat pembuangan sampah, yang keduanya mempunyai keterkaitan pada perilaku penduduk yang membuang sampah ke sungai. Disamping itu, kekhawatiran penduduk terhadap kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara penduduk lokal dan pendatang juga menyebabkan kurang terjaminnya rasa keamanan dan hubungan sosial yang tidak akrab.

Di samping itu umumnya responden (70%) merasakan adanya penyempitan lahan. Kendatipun hal ini tidak menimbulkan dampak kepada diri mereka, namun sebagian besar dari mereka sudah merasakan bahwa lingkungan disekitarnya itu bertambah ramai/banyak. Dan sebagian besar responden lainnya juga merasakan lingkungan di sekitarnya sudah semakin sumpek (sesak). Kondisi sebaliknya dirasakan oleh sebagian kecil responden yang memiliki jenis usaha yang meningkat walaupun hal itu diyakini mengurangi hasil-hasil sawah serta merudikan kalangan petani.

Komersialisasi tanah juga direpson oleh penduduk dimana sebagian besar dari mereka pernah menjual tanahnya dan menyewakan tanahnya. Proses alih fungsi lahan juga berlangsung di daerah ini, disamping tradisi pewarisan tanah yang masih terus berlangsung di dalam keluarga. Komersialisasi tanah ini juga mendorong berubahnya nilai terhadap tanah, sebagaimana dikatakan salah seorang informan berikut:

"Kalau orang yang berpikiran maju maka ia akan menjual tanahnya dengan harga yang lumayan tinggi, kemudian akan membelikannya lagi tanah di tempat lain yang lebih murah harganya. Sehingga ia akan memperoleh tanah yang lebih luas di luar dusun. Perbandingannya kalau bisa 200 : 600, artinya dengan menjual tanah seluas 200 m² maka akan diperoleh 600 m². Namun bagi orang-orang yang belum maju pikirannya, ia akan membiarkan tanah miliknya tetap menjadi tegalan atau kebun"

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya, harga tanah di daerah ini sudah melonjak 30 sampai 40 kali lipat. Pada tahun 1982, harga tanah di sepanjang koridor jalan utama desa itu mencapai Rp7.000,- per m², tetapi

sekarang harga tanah di lokasi yang sama sudah mencapai antara Rp200.000,- sampai dengan Rp300.000,- per m². Kondisi ini merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kualitas dan kuantitas lahan-lahan pertanian.

Terbentuknya Komunitas-komunitas Baru

Salah satu fenomena yang paling menarik di kawasan desa-kota di daerah pinggiran kota ini adalah munculnya komunitas-komunitas baru berdasarkan kelas sosial, etnisitas dan peranan gender. Berbeda dengan komunitas sebelumnya yang cenderung homogen yakni komunitas masyarakat petani dengan sistem sosial kekerabatan yang kental dan bercorak khas pertanian (Tonnie, 1958). Masyarakat baru di kawasan desa-kota ini terbentuk atas suatu komunitas-komunitas yang lain sama sekali dari masyarakat petani itu.

Apabila struktur sosial lama dicirikan dengan hubungan-hubungan sosial feodalistik yang diperankan oleh kalangan petani dan didominasi oleh corak hubungan pertanian, kini dominasi hubungan-hubungan seperti itu kian runtuh dan digantikan oleh hubungan-hubungan sosial yang lebih kompleks. Runtuhnya dominasi dalam hubungan-hubungan pertanian menjadi fenomena menarik di daerah pinggiran kota ini karena diikuti dengan munculnya struktur jasa yang cukup dominan. Struktur ini menggantikan peranan sektor pertanian yang walaupun tidak bisa menjadi lokomotif pertumbuhan (Kunio, 1990).

Struktur jasa telah membentuk suatu sistem sosial masyarakat yang tergantung pada usaha jasa-jasa, yang di dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dusun berguna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Struktur ini terkait erat dengan sistem pasar yang menyediakan barang-barang kepada masyarakat yang semakin konsumtif. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tergantung pada usaha jasa ini cenderung terbentuk sebagai suatu komunitas masyarakat yang konsumtif.

Keberadaan pendatang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembentukan usaha jasa ini. Terutama kalangan mahasiswa yang membutuhkan barang dan jasa yang siap pakai, serta menuntut pola konsumsi yang cukup tinggi serta tidak mampu memproduksi barang dan jasa itu sendiri telah mendorong penduduk desa untuk membentuk usaha jasa itu. Bagi penduduk lokal hal ini menyediakan lapangan pekerjaan baru tanpa harus bekerja keras misalnya dengan cara menyewakan rumahnya untuk pondokan mahasiswa.

Terbentuknya komunitas mahasiswa di dusun-dusun di desa ini menjadi sangat eksklusif karena disamping mereka sangat tergantung dan mengandalkan kerja-kerja jasa penduduk lokal, mereka juga cenderung elitis dalam pergaulan. Mereka adalah kaum terpelajar yang dalam kenyataan sehari-hari sulit berbaur dengan kenyataan hidup penduduk lokal. Komunitas mereka berbasis pada kampus dan pengetahuan.

Sifat yang paling menonjol dari komunitas mahasiswa di desa ini adalah karakteristik multi-etnisnya. Dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda itu tidak jarang sering menimbulkan benturan-benturan budaya dengan penduduk lokal yang terutama paling merasa terganggu dengan kebiasaan mahasiswa yang tidak sesuai dengan adatnya. Konflik seringkali mewarnai hubungan antara mahasiswa pendatang ini dengan penduduk lokal yang biasanya didamaikan oleh aparat pemerintahan desa.

Disamping komunitas mahasiswa yang bercirikan multi-etnis, penduduk pendatang yang tinggal menetap di daerah itu juga mempunyai karakter multi-etnis. Hubungan-hubungan sosial diantara penduduk pendatang ini dengan penduduk lokal lebih sering terbentuk kerjasama dalam upaya meredam konflik. Misalnya, tidak hadirnya penduduk pendatang ini dalam kegiatan sosial kemasyarakatan warga digantikan dengan cara membayarnya dengan sejumlah uang. Hal ini bisa diterima penduduk lokal dan menjadi jalan kompromis penyelesaian konflik.

Kendatipun terkesan eksklusif, penduduk pendatang ini masih mempunyai kesediaan untuk membaur, walaupun biasanya mengalami masalah dengan rutinitas serta waktu yang dimilikinya yakni yang tidak sesuai dengan rutinitas serta pola kerja penduduk lokal yang umumnya hanya bekerja di desanya sendiri dalam bentuk kerja serabutan. Beberapa penduduk pendatang yang bisa menerima keadaan ini bahkan dianggap penduduk lokal sebagai pengedepan, artinya mereka itu yang membawa kemajuan.

Diantara penduduk pendatang ini juga ada yang terlibat aktif di dalam kegiatan sosial keagamaan sehingga diterima sebagai seorang pemimpin keagamaan di desa itu. Hal ini mencerminkan adanya suatu bentuk perebutan pengaruh sosial di dalam kepemimpinan keagamaan seperti dalam kepengurusan masjid yang di dalam dusun itu memang mempunyai kegiatan serta pengaruh yang cukup kuat.

Pengaruh pendatang dalam pembentukan komunitas-komunitas lokal ini juga sangat terasa dalam meningkatnya hubungan-hubungan gender yang semakin sederajat. Hal ini sangat terasa karena semakin banyaknya penduduk pendatang, terutama perempuan yang juga mempunyai pekerjaan diluar rumah, disamping menjadi ibu rumah tangga. Wanita sebagai pekerja dipandang positif jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang menganggap wanita berada pada urusan domestik.

Disamping itu, komunitas-komunitas baru juga muncul di dalam kompleks perumahan yang sangat eksklusif. Komunitas ini tidak berbaur dengan penduduk lokal disekitarnya ataupun sesama pendatang yang menetap di permukiman penduduk. Komunitas ini juga tidak dikenai kewajiban-kewajiban sosial yang telah sejak lama dilakukan oleh penduduk dusun seperti gotong-royong ataupun

denda seperti membayar uang sebagai ganti ketidakhadirannya. Komunitas ini cenderung lebih otonom.

Secara umum, perubahan komunitas ini terjadi di dalam lingkup wilayah desa. Desa sudah terbentuk sebagai suatu kawasan desa-kota yang kompleks dan tidak lagi terbentuk sebagai suatu komunitas desa. Hal ini juga diindikasikan dengan tidak efektifnya pemerintahan desa karena desa yang semakin kompleks, kontrol masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan efektifitas kebijakan pemerintahan desa yang semakin lemah. Dengan meningkatnya hubungan-hubungan komunitas berdasarkan kelas sosial, etnisitas, dan peranan gender itu maka fungsi desa sebagai suatu komunitas menjadi kabur.

Salah satu wilayah administratif desa yang masih bertahan menjadi suatu komunitas adalah wilayah administratif dusun. Walaupun di dalam dusun itu kini telah terbentuk berbagai macam komunitas baru dengan dasar-dasar pembentukannya yang beranekaragam namun di dalam dusun kontrol terhadap komunitas itu masih tetap berlangsung. Sistem pemerintahan dusun juga masih bisa berlangsung cukup efektif dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dusun juga masih kuat. Demikian pula dengan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan di dalam dusun yang masih bertahan hingga saat ini.

Penutup: Sebagai Bahan Diskusi

Berkembangnya desa menjadi suatu kawasan desa-kota secara alamiah (cenderung mengabaikan perencanaan yang ada) telah menimbulkan berbagai persoalan di kawasan itu. Berbagai persoalan yang muncul antara lain, tata ruang desa-kota yang tidak beraturan, kondisi lingkungan yang merosot, ketahanan pangan yang terancam, konflik sosial yang cenderung meluas dan dipertahankan oleh eksklusifitas kelompok di dalam komunitas itu, dan ancaman tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang baik.

Berbagai persoalan muncul dan cenderung tidak terkendali atas terbentuknya suatu kawasan desa-kota yang tidak terencana dengan baik. Sebagai konsekuensi dari meluasnya wilayah-wilayah perkotaan adalah berkembangnya daerah pinggiran kota menjadi kawasan desa-kota. Fenomena ini hampir terjadi di berbagai kota di Indonesia dan hingga saat ini tidak ada suatu sistem perencanaan yang terpadu untuk mengatasi berbagai persoalan itu.

Diskusi pada bagian ini menawarkan adanya suatu sistem perencanaan kawasan desa-kota di daerah pinggiran kota dengan menggunakan metode pengelolaan bersama (co-management). Diduga, persoalan perencanaan tata ruang perkotaan selama ini karena bersifat sentralistis. Artinya, perencanaan suatu wilayah selama ini cenderung bersifat sebagai bahan jadi yang harus dilaksanakan oleh para pemangku yang terkait termasuk penduduk setempat. Padahal suatu perencanaan wilayah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada mekanisme pendukungnya.

Pengelolaan bersama antara perencana wilayah, pemerintah setempat, NGO's perkotaan, DPRD sebagai wakil aspirasi politik masyarakat, dan pemangku-pemangku yang terkait beserta kelompok-kelompok masyarakat semestinya dilibatkan secara bersama-sama dalam merencanakan dan menjalankan suatu pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan. Mekanisme bersama semacam ini perlu dilembagakan dalam rangka menyambut pelaksanaan otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Juhendi, Tadjudin, 2000. *Manajemen Kolaborasi*, Pustaka Latin.
- Kay, Robert and Jacqueline Alder, 1999. *Coastal Planning and Management*, E & FN Spon, London.
- Koestoer, Raldi Hendro, 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-kota Teori dan Kasus*, UI press.
- Kunio, Yoshihara, 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES.
- Riyadi, Rakhmat, 2001. "Dinamika Spasial Wilayah Perkotaan: Kasus Daerah Kabupaten Sleman DI Yogyakarta", dalam Koestoer, Raldi Hendro, *Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus*, UI Press.
- Russwurm, Lorne H., 1987. "Comparative Land Management in the Rural-Urban Fringe of New World Cities", dalam *Rural-Urban Fringe*, C.S. Yadav, New Delhi.
- Subroto, T. Yoyok Wahyu, dkk., 2000. *Model Pola Ruang Konsentris untuk Restrukturisasi daerah Pinggiran Kota (urban Fringe) di Indonesia Studi Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta*, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Tonnies, F, 1957. *Community and Society*, Michigan: Michigan State.